**BAB I**

**Pendahuluan**

1. **Latar Belakang Masalah**

Seiring perkembangan zaman, studi mengenai konsep kepemimpinan semakin berkembang seiring dengan proses perkembangan pengetahuan, proses-proses sosial, dan perkembangan struktur dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya literatur yang mengkaji tentang kepemimpinan dengan berbagai sudut pandang atau perspektifnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perspektif kepemimpinan sangatlah dinamis dalam proses perkembangannya. [Kepemimpinan atau leadership](http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli) merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip dan rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia.

Di Sulawesi selatan terdapat berbagai macam suku diantaranya dikenal dengan suku Bugis. Bugis adalah suku yang tergolong kedalam melayu deuteron, masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari dataran asia tepatnya yunan. Dalam perkembanganya, suku ini berkembang dan membentuk beberapa kerajaan, masyarakat ini kemudian mengembangakan kebudayaan, bahasa, aksara dan sistem pemerintahannya sendiri. Dari dinamika sosial yang sangat kompleks tersebut melahirkan suatu produk kebudayaan dalam bentuk hierarki status sosial masyarakat yang disebut gelar kebangsawanan. Gelar kebangsawanan merupakan konsep kebudayaan yang sudah sangat mapan dan mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Bugis, termasuk di Kabupaten Barru.

Kabupaten Barru secara garis besar merupakan daerah yang didiami oleh etnis Bugis, etnis selain Bugis merupakan etnis pendatang. Saat ini Kabupaten Barru di pimpin oleh seorang Bupati dari golongan bangsawan Bugis, yang dimana aparat pemerintahan lainnya yang juga sebagian besar mempunyai latar belakang kebangsawanan Bugis. Fenomena tersebut merupakan hal yang sudah lazim di Kabupaten Barru seperti halnya di beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan. Secara teoritik golongan kebangsawanan tersebut merupakan konsep stratifikasi sosial warisan budaya feodalisme yang dalam sejarahnya telah menjadi paradigma sosial pada zaman kerajaan Bugis Makassar. Hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap perilaku politik masyarakat Bugis. Perilaku politik tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, dimana masyarakat memiliki penghargaan khusus kepada golongan bangsawan.

Mekanisme kepemimpinan irasional tersebut berjalan sangat teratur karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat setempat yang meyakini bahwa tongkat estapet kepemimpinan harus dilanjutkan oleh keturunan bangsawan Bugis. Masyarakat Barru sudah sejak lama menginternalisasikan kebudayaan tersebut sehingga telah menjadi karakter masyarakat Bugis Barru. Pola tersebut yang kemudian dapat diasumsikan oleh peneliti sebagai pola sosial yang dapat menghambat kemajuan perilaku politik masyarakat, sehingga dianggap penting untuk meneliti mengenai pandangan masyarakat terkait fenomena di atas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat suatu permasalahan dengan judul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Pemimpin formal dari Golongan Bangsawan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru”.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemimpin formal dari golongan bangsawan Bugis ?
3. Faktor-faktor apa yang mendorong masyarakat Bugis memilih pemimpin formal dari golongan bangsawan?
4. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pemimpin formal dari golongan bangsawan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong masyarakat memilih pemimpin formal dari golongan bangsawan.
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat-manfaat untuk orang lain. Secara umum, ada dua manfaat dalam sebuah penelitian, yakni manfaat yang bersifat teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pemimpin dari golongan bangsawan.

1. Secara praktis

Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut dan sebagai data dasar mengenai permasalahan-permasalahan dalam memilih pemimpin dari golongan bangsawan.

**BAB II**

**Kajian Pustaka dan Kerangka Pikir**

1. **Konsep Persepsi**

* Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan. Pengindraan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indra. Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Karena itu proses persepsi tidak dapat lepas dari proses pengindraan, dan proses pengindraan merupakan proses yang mendahului terjadinya persepsi. Proses pengindraan terjadi setiap saat, yaitu pada waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indra. Alat indra merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya (Branca, 1964; Woodworth dan Marquis, 1957).

Stimulus yang mengenai individu itu kemudian diorganisasikan, diinterpretasikan, sehingga individu menyadari tentang apa yang di indranya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus diterima alat indra, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang diindra tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 1981).

Disamping itu menurut Maskowitz dan Orgel (1969) persepsi itu merupakan proses yang *intergrated* dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa *persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organism atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergrated dalam diri individu*. Karena merupakan aktifitas yang integrated, maka seluruh pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam persepsi itu.

* Aspek-aspek Persepsi

Menurut Walgito (2002), pengindraan terjadi dalam suatu konteks tertentu, konteks ini disebut sebagai dunia persepsi. Agar dihasilkan suatu pengindraan yang bermakna, ada aspek-aspek dalam dunia persepsi diantaranya adalah:

1. Sensor sel dasar

Rangsangan yang diterima sesuai mobilitas tiap-tiap indera, yaitu sifat sensori dasar dari masing-masing indera cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu untuk perasa, bunyi untuk pendengaran dan sifat permukaan bagi peraba.

1. Dimensi ruang

Dunia persepsi mempunyai sifat ruang (dimensi ruang). Kita dapat menyatakan atas bawah, tinggi rendah, luas sempit, depan belakang.

1. Dimensi waktu

Dunia persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat, lambat, tua dan muda.

1. Konteks

Obyek-obyek atau gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan konteks ini merupakan keseluruhan yang menyatu. Kita melihat meja tidak berdiri sendiri tetapi dalam ruang tertentu disaat tertentu, letak atau posisi tertentu.

1. Tujuan

Dunia persepsi merupakan dunia penuh arti. Kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya dengan diri kita.

* Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Siagian (1995) dalam bukunya “*Teori Motivasi dan Aplikasi*”, secara umum terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi seseorang yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal

Faktor internal yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu (Niven, 2002). Diantara faktor internal tersebut adalah:

1. Motif

Motif adalah semua penggerak, alasan-alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.

1. Minat

Minat adalah perhatian terhadap sesuatu stimulus atau objek yang menarik kemudian akan disampaikan melalui panca indra.

1. Harapan

Harapan merupakan perhatian seseorang terhadap stimulus atau objek mengenai hal yang disukai atau diharapkan,

1. Sikap

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau objek. Sikap dapat menggambarkan suka atau tidak suka seseorang terhadap objek. Sikap juga dapat membuat seseorang mendekati atau menjauhi orang lain atau objek lain.

1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu.

1. Pengamalan

Pengalaman merupakan peristiwa yang dialami seseorang dan ingin membuktikan sendiri secara langsung dalam rangka membentuk pendapatnya sendiri. Hal ini berarti pengalaman yang dialami sendiri oleh seseorang akan lebih kuat dan sulit dilupakan dibandingkan dengan pengalaman orang lain.

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu yang meliputi:

1. Objek

Objek ini akan menjadi sasaran dari persepsi yang dapat berupa orang, benda atau peristiwa, dan objek yang sudah dikenali tersebut akan menjadi sebuah stimulus.

1. Faktor situasi

Situasi merupakan keadaan dimana keadaan tersebut dapat menimbulkan sebuah persepsi.

1. **Konsep pemimpin formal**

Menurut para ahli tentang pemimpin:

1. Ahmad Rusli dalam kertas kerjanya Pemimpin Dalam Kepimpinan Pendidikan (1999)

Menyatakan pemimpin adalah individu manusia yang diamanahkan memimpin subordinat (pengikutnya) ke arah mencapai matlamat yang ditetapkan.

Sedangkan pemimpin formal dapat di defenisikan.

1. Kartini Kartono (1994 . 33)

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya kecakapan dan kclebihan disatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

1. C. N. Cooley (1902)

Pemimpin itu selalu merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.

1. Henry Pratt Faiechild dalam Kartini Kartono (1994 : 33)

Pemimpin dalam pengertian ialah seorang yang dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, mengarahkan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi. Dalam pengertian yang terbatas, pemimpin ialah seorang yang membimbing, memimpin dengan bantuan kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptansi/ penerimaan secara sukarela oleh para pengikutnya.

Dari beberapa pandangan tentang pemimpin di atas dapat di simpulkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan/atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Beberapa definisi tentang pemimpin formal:

1. Pemimpin formal” adalah orang yang menjadi pemimpin karena ”legalitas”-nya. Misalnya, karena ia terpilih secara sah melalui pemilu, atau kongres, atau muktamar, atau apa pun namanya. Yang bersangkutan telah memenuhi semua peraturan yang ada (Darmaputera, 2004).
2. Anonim (2006), pemimpin formal adalah pemimpin yang secara resmi diberi wewenang/ kekuasaan untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu, dan dia mempertanggungjawabkan kekuasaan/wewenangnya tersebut pada atasannya. Pemimpin formal pada umumnya berada pada lembaga formal juga, dan keputusan pengangkatannya sebagai pemimpin berdasarkan surat keputusan yang formal. Seorang pemimpin formal bisa saja hanyalah seorang kepala yang memiliki wewenang sah berdasarkan ketentuan formal untuk mengelola anggotanya, atau jika dalam organisasi memiliki wewenang untuk membawahi dan memberi perintah pada bawahan-bawahannya.

Jadi dapat diartikan bahwa konsep pemimpin formal yang akan diteliti adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat baik itu melalui pemilu untuk menduduki jabatan kekuasaan tertinggi di pemerintahan daerah seperti kepala desa dan bupati.

1. **Startifikasi Sosial**

Dalam kajian sosiologi dan ilmu sosial, istilah stratifikasi sosial mengacu pada susunan hierarkis individu-individu dalam masyarakat . istilah stratifikasi (stratification) berasal dari istilah ilmu giologi,” strata” yaitu lapisan tanah yang dibentuk oleh proses alam. Dalam masyarakat barat, istilah “ stratifikasi “ digunakan untuk menggambarkan lapisan utama masyarakat: kelas atas (upper class), kelas menengah ( middle class), dan kelas bawah ( lower class).

Soerjono, mengutip Pitirim A. Sorokin dalam buku Pengantar Sosiologi, mengatakan bahwa stratifikasi sosial adalah pembendaan pendudukan atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (Nurani Soyomukti, 2010:373). Sementara itu Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu system sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, previlese, dan prestise. Cuber mengartikan stratifikasi sosial sebagai suatu pola yang ditempatkan di atas kategori dari hak-hak yang berbeda (Nurani Soyomukti, 2010:373).

Proses terjadinya stratifikasi sosial sendiri bias terjadi secara otomatis karena fakto-faktor yang dibawa individu sejak lahir. Misalnya, kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat keaslian keanggotaan dalam masyarakat. Biasa pula terjadi dengan sengaja untuk tujuan bersama. Biasanya, dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti pemerintah, partai politik, perusahaan, perkumpulan, dan angkatan bersenjata. Stratifikasi sosial dapat berfungsi sebagai berikut:

1. Distribusi hak-hak istimewah yang objektif, seperti menentukan penghasilan, tingkat kekayaan, keselamatan, dan wewenang pada jabatan, pangkat, kedudukan seseorang.
2. Sistem pertanggaan (tingkatan) pada strata yang diciptakan masyarakat yang menyangkut pristise dan penghargaan, misalnya pada seseorang yang menerima anugrah penghargaan/gelar/kebangsawanan, dan sebagainya.
3. Kriteria sistem pertentangan, yaitu apakah didapat melalui kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, kepemilikan, wewenang, atau kekuasaan.
4. Penentuan lambang-lambang (simbol status) atau kedudukan, seperti tingkah laku, berpakaian, dan bentuk rumah.
5. Tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan dan
6. Alat solidaritas di antara individu-individu atau kelompok yang menduduki system sosial yang sama dalam masyarakat.

Fungsi stratifikasi sosial sebagaimana dikatakan oleh Dingsley Davis dan Wilbert Moore:

1. Stratifikasi menjelaskan kepada seseorang “tempat”nya dalam masyarakat sesuai dengan pekerjaan, menjelaskan kepadanya bagaimana ia harus menjalangkannya dan sehubungan dengan tugasnya mejelaskan apa dan bagaimana efek serta sumbangannya kepada masyarakat.
2. Karena peranan setiap tugas dalam setiap masyarakat berbeda-beda dengan seiring adanya tugas yang kurang dianggap penting oleh masyarakat (karena beberapa pekerjaan meminta pendidikan dan keahlian terlebih dahulu)’ berdasarkan perbedaan persyaratan dan tuntutan atas prestasi kerja, masyarakat biasanya member imbalan kepada yang melaksanakan tugas dengan baik dan sebaliknya “menghukum” yang tidak atau kurang baik.
3. Penghargaan yang diberikan biasanya bersifat ekonomis, berupa pemberian status sosial atau fasilitas-fasilitas yang karena distribusinya berbeda membentuk struktur sosial. (Nurani Soyomukti, 2010:377)

Menurut Soerjono Soekanto, dilihat dari sifatnya, pelapisan sosial dibedakan menjadi sistem pelapisan sosial tertutup, sistem pelapisan sosial terbuka, dan system pelapisan sosial campuran. Stratifikasi sosial tertutup adalah stratifikasi yang anggotanya dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertical. Walaupun ada mobilitas, terbatas pada mobilitas horizontal saja. Stratifikasi sosial terbuka adalah bersifat dinamis karena mobilitasnya dinamis karena mobilitasnya besar. Setiap anggotanya strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Dan stratifikasi sosial campuran yaitu kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dengan stratifikasi sosial terbuka. (Nurani Soyomukti, 2010:377)

* **Konsep Stratifikasi dalam golongan bangsawanan**

Suatu sistem kerajaan dimana pemerintahnya berasal dari golongan [bangsawan](http://ms.wikipedia.org/wiki/Bangsawan) atau *aristokrat*. Bangsawan disini tidak semestinya termasuk golongan raja tetapi mereka yang datang dari kumpulan berstatus tinggi dan berharta.

Menurut Rahman (1988), bangsawan digambarkan kedalam beberapa golongan antara lain :

1. Puang *ressu* ( Ranuh )

Lapisan ini mempunyai kadar darah “bangsawan” dalam perhitungan simbolik, *disebut mannasa ressu* (benar-benar renuh). Ia merupakan hasil dari perkawinan antara seoarang ayah dengan ibu yang masing-masing mempunyai kadar darah *melabu tongan* (utuh dan sempurna).

1. Puang *sangnging* ( murni)

Lapisan ini mempunyai kadar darah “bangsawan” dalam perhitungan simbolik yang disebut *sangnging*. Ia merupakan hasil perkawinan antara seorang ayah dengan ibu yang masing-masing pihak mempunyai kadar darah *sangnging.* Dapat juga terjadi bila ayah berkadar dara ressu dan ibu berkadar darah sangnging atau sebaliknya.

1. Puang *tallupparapa* ( tiga perempat)

Lapisan ini memiliki kadar darah “bangsawan” dalam perhitungan simbolik yang disebut *tallupparapa*. Ia merupakan hasil perkawinan antara ayah dengan ibu yang masing-masing berkadar *tellupparapa*. Dapat juga terjadi sebagai hasil perkawinan seorang ayah berkadar darah “bangsawan” *ressu* atau *sangnging* dengan seorang ibu yang berkadar yang berkadar darah seperepa ( seperempat ) ataupun sebaliknya.

1. Puang *sassigi* (setengah atau separu)

Lapisan ini memiliki kadar darah “bangsawan” dalam perhitungan simbolik yang disebut *sassigi*. Ia merupakan hasil perkawinan antara seoarang ayah dengan seorang ibu yang masing- masing memiliki perhitungan kadar darah *sassigi*. Dapat juga terjadi bila ayah memiliki perhitungan kadar darah darah *tallupparapa’* dan ibu *separappa* atau sebaliknya. Ia juga merupakan hasil kadar darah *ressu* atau *sangnging* dengan ibu yang memiliki kadar darah biasa tanpa kadar darah tetapi bukan budak.

1. Puang separapa ( seperempat)

Lapisan ini memiliki kadar darah “bangsawan” dengan perhitungan simbolik disebut saparapa. Ia merupakan perkawinan hasil perkawinan antara seorang ayah dengan seorang ibu yang masing-masing mempunyai perhitungan kadar dara separapa. Ia juga merupakan hasil perkawinan antara seoarang ayah yang mempunyai kadar darah sassing dengan ibu tanpa perhitungan kadar darah tetapi bukan budak.

1. Puang *sallesor* atau *sallesso*’ ( kurang dari seperempat)

Lapisan ini memiliki kadara darah “bangsawan” dalam perhitungan simbolik yang disebut *sallesor* atau *sallego*. Ia merupakan hasil perkawinan antara seorang ayah dengan seorang ibu yang masing-masing mempunyai perhitungan kadar kurang dari seperempat. Ia juga dapat terjadi bila perkawinan antara seorang ayah yang memiliki kadar darah *separapa* dengan seorang ibu yang tidak memiliki perhitungan darah tetapi bukan budak.

1. Puang *dipisupai anna sarombong* (nanti digosok baru menghasilkan bau harum)

Lapisan ini memiliki kadar darah “bangsawan” dalam perhitungan simbolik disebut *dipisupai anna sarambong*. Ia merupakan hasil dari perkawinan yang terjadi bila seorang ayah dengan seorang ibu yang masing-masing mempunyai kadar darah dala perhitungan kurang darah dari *sallesor*. Dapat jiga terjadi dari hasil perkawinan antara seorang ayah yang memiliki nkadar darah *sallesor* kawin dengan seorang ibu yang tidak memiliki perhitungan kadar darah tetapi bukan budak dan sebaliknya.

Menurut Friedericy (dalam Mattulada,1985,30), dulu ada dua lapisan pokok masyarakat, yaitu : (1) ana, karung ( ana’ karaeng dalam bahasa Makassar) ialah lapisan kaum kerabat raja-raja, (2) *to-maradeka* adalah lapisan orang merdeka yang merupakan sebagian besar dari rakyat Sulawesi selatan.Dalam usaha untuk mencari latar belakang terjadinya pelapisan masyarakat, Fredericy berpedoman kepada peranan tokoh-tokoh yang disebut dalam La Galigo dan ia berkesipulan, bahwa masyarakat bugis dan Makassar pada mulanya hanya terdiri dari dua lapisan masyarakat. Lapisan *ata* merupakan suatu perkembangan kemudian yang menjadi dalam zam perkembangan dari organisasi-organisasi pribumi di Sulawesi selatan.

Pada abad ke-20 lapisan *ata* dihilangkan karena larangan dari pemerintah colonial dan desakan dari tokoh agama setempat. Sesudah perang dunia ke-2, arti dari perbedaan antara lapisan karaeng, to maradeka, dan ata semakin kurang. Dalam kehidupan masyarakat juga sudah mulai berkurang dengan cepat. Walaupun masi dipakai, akan tetapi tidak lgi mempunyai arti seperti masa lalu (fase tradisonal dan fase islam moderen), pada masa sekarang, makna stratifikasi sosial pada etnis bugi Makassar justru sering diperkecil dengan sengaja.sebab stratifikasi sosial lama sering dianggap sebagai hambatan untuk kemajuan.( Mattulada,1985,35).

Sedangkan stratifikasi sosial menurut masyarakat Sulawesi selatan menurut Matulada (1985) memberikan peranan dalam kehidupan, bukan hanya menurut penjiwaan. Pada umumnya persekutuan orang bugis berdasarkan perinsip genealogisnya atau persekutuan kekerabatan, sehingga orang Bugis dan Makassar tidak terlalu terikat kepada wilayah tertentu dalam mencari nafkah.

Kerena dimana saja mereka berkumpul bersama-sama dalam suatu persekutuan geneologis seperti di jumpai adanya: (1) *Ajjoareng* (orang yang menjadi pemimpin) bernama *arung* (bugis) dan *panggawa* ( Makassar) adalah tokoh yang di jadikan sumbu kegiatan integrative dan perkembangan hidup kebudayaan secara keseluruhan sejak kerajaan Bone kehilangan kedaulatan pada tahun 1950 istilah *ajjoareng* (pemimpin) tidak lagi berarti aparat kekuasaan pemerintahan formal. (2) Joa ( pengikut) pada zaman dahulu terdiri atas lapisan masyarakat maradeka (merdeka) yang menunjjukkan kesetiaan kepada *ajjoareng* ( pemimpin ). Dalam proses integrasi kegiatan antara lingkaran pusat dan lingkaran di luarnya diatur oleh *pangadereng* (pedoman hidup) yang meliputi lingkaran kehidupan.

Sekarang tidak ada lagi *arung* ( Bugis) atau pampawa *ade* (penjaga adat) dalam arti *anjjoreng* ( pemimpin), namun puncak piramida sosial diduduki oleh kelompok elit baru yang terdiri atas aparat kekuasaan Negara, seperti gubernur dan bupati/walikota, golongan cendekiawan, militer dan pemilik modal. Setelah masa penjajahan Belanda golongan elite kembali menempati kedudukan elite yang baru, dengan komposisi elit inilah yang berlangsung sampai kemerdekaan RI. Sebagai berikut: (1) Kaum *Anakarung* ( bangsawan) yang setia kepada belanda dan golongan bangsawan yang berpendidikan (*ambtenaar)* sebagai kelas utama. (2) kaum *ambtenaar gubernermen*, kalangan cendekiawan yang mendapatkan pendidikan formal dan kalangan ulama islam/adat serta pemimpin gerakan sosial sebagai kelas menengah.(3) Kaum *Hartawan,* pedagang dan pengusaha, sebagai elit kelas dasar.

Terbukanya peluang untuk menjadi elit bagi setiap lapisan masyarakat menyebabkan munculnya berbagai pengelompokan elite di Sulawesi selatan. Setiap elite membentuk kelompok sesuai dengan profesinya. Ada kelompok militer, pengusaha, partai politik, suku, bangsawan, ulama dan berbagai kelompok elit lainya.

1. **Teori Stratifikasi Fungsional**

Davis dan Moore menjelaskan bahwa mereka menganggap stratifikasi sosial sebagai phenomena universal dan penting. Mereka menyatakan bahwa tak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. Menurut pandangan mereka, stratifikasi adalah keharusan fungsional semua masyarakat memerlukan sistem seperti dan keperluan ini menyebabkan adanya sistem stratifikasi. Mereka juga memandang sistem stratifikasi sebagai sebuah struktur, dan menunjukkan bahwa stratifikasi tidak mengacu pada individu di dalam sistem stratifikasi, tetapi lebih kepada sistem posisi ( kedudukan ). Mereka memusatkan perhatianya pada persoalan bagaimana cara posisi tertentu memengaruhi tingkat prestise yang berbeda dan tidak memusatkan perthatian pada masalah bagaimana cara individu dapat menduduki posisi tertentu.( Geogrge ritzer- Douglas J. Goodman, 2012,118)

Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara masyarakat memotivasi dan menempatkan individu pada posisi mereka yang “tepat”. Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjado dua masalah. Pertama, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang “tepat” itu keinginan untuk mengisi posisi tertentu. Kedua, segera setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara masyarakat menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka. (Geogrge ritzer- Douglas J. Goodman, 2012, 118).

Penempatan posisi yang tepat dalam masyarakat menjadi masyarakat menjadi masalah karena tiga alasan mendasar. Pertama, posisi tertentu lebih menyenangkan untuk diduduki ketimbangan posisi yang lain. Kedua, posisi tertentu lebih penting untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat ketimbang posisi yang lain. Ketiga, posisi-posisi sosial yang berbeda memerlukan bakat dan kemampuan yang berbeda puala.

Davis dan Moore tak bermaksud untuk menyatakan bahwa masyarakat secara sadar membangun sistem stratifikasi untuk meyakinkan bahwa posisi tingkat tinggi akan terisi dengan memadai. Mereka bermaksud menjelaskan bahwa stratifikasi adalah “perlengkapan yang berevolusi secara tak sadar”. Perlengkapan ini ada dan harus ada dalam setiap masyarakat untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Menurutnya, untuk meyakinkan bahwa individu mau menduduki posisi tingkat yang tinggi, masyarakat harus menyediakan berbagai hadia untuk idividu ini, termasuk prestese tinggi, gaji besar dan kesenangan yang cukup. .( Geogrge ritzer- Douglas J. Goodman,2012,119)

1. **Feodalisme**

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik yang dijalankan kalangan bangsawan/ monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpi lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada abad petengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainya sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu yang di tunjukkan oleh monarki (biasanya raja atau lord).

Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abat ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan yang di kuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah “masyarakat feudal”. Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negative, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan diajukan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas.

Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel Ciri-ciri feodalisme antara lain adalah adanya lapisan atas, yakni tuan tanah, dan lapisan bawah (buruh). Buruh harus memberi upeti kepada tuan tanah karena pada saat itu tuan tanah yang paling berkuasa dan buruh adalah pekerja yang hanya memanfaatkan tanah si pemilik. Ciri lainnya adalah adanya kepatuhan lapisan bawah terhadap lapisan atas (nasib lapisan bawah ditentukan oleh lapisan atas). Untuk itu, sebagai bentuk kepatuhan karena nasibnya ditentukan oleh lapisan atas, maka lapisan bawah harus menuruti kehendak lapisan atas, dan tidak mempunyai hak untuk berpendapat.

1. **Kerangka Pikir**

Struktur pemerintahan secara ideal dapat diasumsikan sebagai alat untuk mengatur dan mempermudah proses-proses sosial dan ekonomi dalam masyarakat, dari asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa struktur pemerintahan pada prinsipnya merupakan pelayan dari kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka tersebut sangat jelas bahwa kriteria untuk menjadi pemimpin dalam struktur pemerintahan harus sesuai dengan tujuan diselenggarakannya struktur pemerintahan. Kriteria tersebut tentunya harus didasarkan pada kapabilitas seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan secara teori maupun praktek dalam mengarahkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang dipimpinnya, dalam hal ini pemimpin harus memiliki latar belakang pendidikan yang dapat mendukung dalam upaya-upaya kepemimpinan. Lalu bagaimana dengan fenomena kepemimpinan struktur pemerintahan di Kabupaten Barru yang menjadikan golongan bangsawan sebagai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin, dan apa yang menjadi faktor pendorong masyarakat Barru lebih senang memilih pemimpin berdasarkan gelar kebangsawanan dan bukan karena kapabilitasnya?.

Stigmatisasi terhadap pola kepemimpinan pada masyarakat di Kabupaten Barru pada dasarnya berangkat dari fenomena kebudayaan yang telah menjadi bangunan konstruksi sejak lama dan dilakukan secara sadar tanpa ada upaya dari masyarakat untuk mempertanyakan kondisi tersebut.

Untuk lebih memahami kerangka konsep dari penelitian ini peneliti merangkum dalam bentuk skema kerangka konsep di bawah ini:

MASYARAKAT

MASYARAKAT BIASA

MASYARAKAT BANGSAWAN

PEMIMPIN

PERSEPSI MASYARAKAT

FAKTOR PENDORONG

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Dasar dan Metode penelitian**

Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menekankan pada penggunaan data yang diperoleh dari lapangan. Menurut Maleong (2005;6) penelitian kualitatif adalah penilitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode alamiah. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif,untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemimpin dari golongan bangsawan di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kecamatan Barru kabupaten Barru. Adapun alasan pemilihan lokasi ini karena masyarakat di kecamatan Barru kabupaten Barru ketika memilih pemimpin terlebih dahulu melihat apakah calon pemimpin tersebut dari golongan bangsawan.

1. **Objek dan Informan**

Objek penelitian adalah masyarakat yang ada di kecamatan Barru Kabupaten Barru. Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun informan dalam penelitian masyarakat kecamatan Barru yang tercatat sebagai wajib pilih di BPS sebanyak 13 orang di kecamatan Barru kabupaten Barru.

Dalam penelitian ini, informan yang menjadi sumber data, dipilih secara purposive sampling, purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penelitian sampel sumber data, pada proposal masih bersifat sementara, dan akan berkembang kemudian setelah peneliti di lapangan, sugiyono ( 2009:218)

1. **Sumber Data**
2. Jenis Data primer, adalah data yang diperoleh dari informan dalam penelitian.
3. Data sekunder, adalah data pelengkap yang diperoleh dari laporan-laporan instansi/dokumen yang terkait dalam penelitian ini..
4. **Deskripsi Fokus**

Untuk memperjelas pemahaman yang jelas dalam melakukan penelitian maka peneliti mencoba mendeskrifsikan konsep-konsep yang dimaksud yaitu:

1. Persepsi adalah pandangan atau tanggapan atau pengamatan masyarakat kecamatan Barru mengenai pemimpin formal dari golongan bangsawan.
2. pemimpin adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi individu dan/atau sekelompok orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan.
3. Pemimpin formal adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat baik itu melalui pemilu untuk menduduki jabatan kekuasaan tertinggi di pemerintahan daerah seperti kepala desa dan bupati.
4. Golongan bangsawan adalah Golongan bangsawan atau *aristokrasi* merupakan suatu sistem kerajaan dimana pemerintahnya berasal dari golongan [bangsawan](http://ms.wikipedia.org/wiki/Bangsawan) atau *aristokrat*. Bangsawan disini tidak semestinya termasuk golongan raja tetapi mereka yang datang dari kumpulan berstatus tinggi dan berharta.

Jadi yang yang dimaksud peneliti dalam penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Pemimpin Formal Dari Golongan Bangsawan Kecamatan Barru Kabupaten Barru adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat kepada pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat yang tergolong pemimpin aristokrat di Kecamatan Barru Kabupaten Barru terutama pada pemilihan kepala daerah.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mencapai tingkat pengumpulan data yang maksimal dan lengkap maka akan di tempuh langkah-langkah sebagai berikut:

* 1. Observasi. Melakukan penjajakan penjajakan lapangan sebelum mengambil data yang bersifat primer. Hal ini dilakukan sebagai acuan untuk mengidentifikasi masalah dan karakteristik lokasi-lokasi,sekaligus mengambil data statistic lapangan-lapangan terkait, penjajakan ini bertujuan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang terbaik dalam mencari problem social sifatnya masih terbuka.
  2. Wawancara secara mendalam (indept interview) dan wawancara bebas untuk keperluan ini wawan cara dilakukan terhadap sejumlah informan dari masyarakat di kecamatan barru yang tercatat di BPS sebagai wajib pilih. Wawancara ini dilakukan dengan Indonesia dan bahasa bugis sesuai dengan bahasa yang dikuasai wawancara ini dipusatkan pada semua golongan masyarakat yang ada di Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
  3. Observasi partisipasi (obsevasi partisifant) keterlibatan secara langsung peneliti di lapangan dengan masyarakat dari semua golongan.
  4. Dokumentasi, peneliti melakukan pengambilan gambaran atau foto untuk melengkapi sumber data agar lebih jelas. Pengambilan foto dapat dilakukan oleh peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain agar terlihat peran serta peneliti dalam penelitian ini.

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting dalam memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti, karena dengan analisis inilah dengan data yang akan nampak mamfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisir data, kemudian mengelompokkan, mengurutkan, dan mengkatagorikan data yang diperoleh dari kegiatan observasi, dan wawancara. Unit analisisnya adalah masyarakat yang tercatat di BPS sebagai wajib pilih yang terdapat di Kecamatan Barru Kabupaten Barru.